

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Ingin Penjelasan Lebih Detail

Komisi E akan Panggil Ancol Soal Rencana Reklamasi

JAKARTA—Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Abdul Aziz menyebut rencana perluasan reklamasi Ancol sudah ada sejak era Gubernur DKI Fauzi Bowo.

"Menurut saya ini kan rencana ini sudah dari periode sebelumnya. Pak Anies cuma melanjutkan dari gubernur sebelumnya. Dari Pak Fauzi Bowo sudah ada (reklamasi Ancol)," kata Aziz saat dihubungi, Rabu (1/7/2020).

Aziz menyebut pihaknya tidak merasa dilangkahi dengan terbitnya izin perluasan reklamasi Ancol. "Pak Anies melanjutkan, mungkin di periode beliau (Anies) masih (perluasan) 100 hektare," ucapnya. Meski demikian pihaknya akan memanggil pihak Pembangunan Jaya Ancol untuk menanyakan detail reklamasi perluasan Ancol. Apakah sudah ada kajian atau tidak.

"Kita akan undang untuk mendetailkan. Ini reklamasi sudah ada kajian apa belum, Amdal seperti apa, Permodalan seperti apa. Apakah APBD atau swasta, seperti apa," ucapnya. Selain itu, Aziz menyebut PT Pembangunan Jaya Ancol akan membangun wahana baru dan fasilitas meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE). "Ada beberapa wahana baru, ruang meeting, ada juga hotel dan tempat terbuka," ucapnya.

Penjelasan singkat terkait rencana pembangunan di perluasan reklamasi Ancol itu diketahui Aziz saat kunjungan Komisi B ke BUMD DKI salah satunya PT Ancol pada 30 Juni 2020. Pada kunjungan itu, pihak Ancol belum menjelaskan detail rencana pembangunan. "Kemarin kita kunjungan cuma menerima informasi saja. Next kita akan undang (Ancol) untuk mendetailkan. Ini kajian sudah ada? dan lainnya," ucapnya.

Menurut Aziz, pihaknya tidak ada kecolongan dengan rencana reklamasi itu. Sebab, pembangunan baru rencana dan akan dibahas kembali oleh

Komisi B. "Mereka kan baru rencana, ini kan masih di awal. Tidak (kecolongan) karena ini baru rencana. Nah tugas kita mendalaminya lagi dalam waktu dekat," ucapnya.

Merasa Kecolongan

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak merasa kecolongan terkait reklamasi kawasan Ancol seluas 155 hektare (ha) yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Izin perluasan yang secara rinci bagi kawasan rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) seluas 35 ha dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur 120 ha itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 sejak Februari 2020.

"Boleh dibilang kami kecolongan. Sebab, harusnya dibahas di DPRD dulu," kata Gilbert. Politisi PDI Perjuangan ini juga menilai PT Pembangunan Jaya Ancol selaku pengembang proyek reklamasi ini

terkesan menutup-nutupinya. Selama ini perusahaan milik daerah itu tidak pernah menyampaikan pemberian izin tersebut kepada DPRD DKI.

"Selama rapat dengan Jaya Ancol, mereka enggak menyampaikan ke kami. Makanya kami juga bingung tiba-tiba sudah ada kepgub," katanya. Komisi B DPRD DKI Jakarta akan meninjau langsung proyek reklamasi tersebut di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Pihaknya segera memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk membahas reklamasi Ancol tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar banyak soal reklamasi Ancol ini. Dia mengaku akan menjelaskan selengkap mungkin pada saatnya nanti. "Nanti dijelasinnya lengkap sekalian, jangan doorstop," katanya di Balai Kota.

Anies Baswedan mengeluarkan izin pengembangan kawasan rekreasi untuk PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dengan total luas 155 hektare. Izin dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Gubernur

DKI Jakarta tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi seluas 35 hektare dan Perluasan Kawasan Rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 120 hektare tertanggal 24 Februari 2020.

VP Corporate Secretary PJA, Agung Praptono di Jakarta, Senin menjelaskan perluasan kawasan rekreasi itu untuk menjadikan Ancol bukan hanya kebanggaan DKI Jakarta tetapi juga ikon Indonesia. "Saat ini masih dalam tahapan SK, belum ada perkembangan," ujar Agung.

Agung mengatakan semua proses dan tahapan sedang dilaksanakan sebagai bagian dari rencana Ancol untuk menjadi kawasan rekreasi terpadu terbesar di Asia Tenggara. Sebagai perusahaan terbuka milik Pemprov DKI Jakarta, Ancol membutuhkan pembangunan kawasan baru dan peningkatan kapasitas untuk kawasan yang sudah ada. Dengan proyek itu, secara tidak langsung juga meningkatkan aset perusahaan. (dni/ant)



Menurut saya ini kan rencana ini sudah dari periode sebelumnya, Pak Anies cuma melanjutkan dari gubernur sebelumnya. "

Abdul Aziz
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta